



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PERUBAHAN

RENJA

2025



NIK

Password

Sistem Informasi
Administrasi Kependu

Masuk



dukcapil Kab. Semarang



Kirim Email Di Sini
disdukcapil@semarangkab.go.id



Kunjungi Laman Kami
<http://dukcapil.semarangkab.go.id/>



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang merupakan pedoman pokok pembangunan untuk kurun waktu triwulan akhir tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun horizontal.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang disusun sebagai hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan semester I untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2025. Proses Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergi antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJMD, RKPD, dan Renstra). Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Misi dan Visi yang telah ditetapkan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun dalam upaya mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan dibuat karena adanya perubahan RKPD akibat adanya perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan yang terjadi selama tahun 2025. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan merupakan bentuk

pelaksanaan Permendagri Nomor 87 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2025 adalah:

1. Permendagri Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan yang bersifat tahunan yang telah disusun pada tahun 2025. Renja Perangkat

Daerah Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tetap menjadi bagian secara utuh dari upaya pelaksanaan Renstra Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Perubahan kedua Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dimaksudkan untuk :

1. Menyesuaikan rencana kerja dinas sesuai dengan situasi dan kondisi Perangkat Daerah;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Disdukcapil dalam melaksanakan tupoksinya dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi Disdukcapil dalam menentukan dan menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2025;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi penyusunan KUPA PPASP dan RKA Perubahan APBD Tahun 2025.

Adapun tujuan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang adalah terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

BAB I. PENDAHULUAN.

Berisikan uraian mengenai :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

Target Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, direncanakan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 12.396.007.000,- (Dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ribu rupiah) terdiri dari sumber Dana Bagi Hasil (DBH).

Penetapan APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pagu Anggaran Rp. 12.790.534.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Capaian program kegiatan Evaluasi Pencapaian Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.072.475.585,- atau 16,20 % rincian dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Realisasi Keuangan Tahun 2024

No	Uraian	Renja Tahun 2025	DPA Tahun 2025		Capaian Triwulan I Tahun 2025		% Capaian Tahun 2025
			K	Rp	K	Rp	
	TOTAL BELANJA	12.396.007.000	100	12.790.534.000			
E	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	7.888.512.000	100	8.333.689.250			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.063.000	100	38.758.000	28	9.687.000	24,99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.702.000	5	24.982.000	2	7.354.000	29,44

No	Uraian	Renja Tahun 2025	DPA Tahun 2025		Capaian Triwulan I Tahun 2025		% Capaian Tahun 2025
			K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.508.000	5	5.073.000	2	833.000	16,42
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.853.000	4	8.703.000	1	1.500.000	16,42
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,448.771.000	100	7.004.358.000	30	1.713.903.408	24,47
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	6.406.471.000	80	6.965.061.500	80	1.705.553.408	24,49
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	42.300.000	12	41.296.500	3	8.350.000	22,22
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000	100	7.567.750	0	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.000.000	2	7.567.750	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.500.000	100	360.321.500	30	37.082.000	10,29
	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	150.500.000	1	150.485.000	0	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.000.000	1	118.526.000	0	18.874.000	15,92
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.000.000	12	91.310.500	3	18.208.000	19,94
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000.000	100	417.054.000	0	0	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	475.000.000	2	392.080.000	0	0	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	20	24.974.000	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	274.739.000	100	274.384.000	30	73.480.395	26,78
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000	12	49.701.000	3	8.676.000	17,46
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.341.000	12	160.321.000	3	32.813.025	20,47
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.398.000	12	64.362.000	3	31.991.370	49,71
	Pemeliharaan Barang	231.439.000	100	231.246.000	30	38.828.951	16,79

No	Uraian	Renja Tahun 2025	DPA Tahun 2025		Capaian Triwulan I Tahun 2025		% Capaian Tahun 2025
			K	Rp	K	Rp	
	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.482.000	10	83.438.000	2	16.509.766	19,79
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	2	59.938.000	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.957.000	2	37.896.000	1	11.629.185	30,69
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	10	49.974.000	2	10.690.000	21,39
B	Program Pendaftaran Penduduk	1.553.297.000	99,93	1.519.172.250	n/a	93.394.276	6,15
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.529.772.000	150.000	1.496.238.250	18.500	93.394.276	6,24
	Pendataan penduduk Non Permanen dan rentan Administrasi kependudukan	44.459.000	2	38.704.250	0,5	10.585.000	27,35
	Pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	924.002.000	60.000	923.973.000	0	0	0
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	25.000.000	3	21.412.500	1	5.130.000	23,96
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	496.145.000	1	475.617.000	0,25	75.987.776	15,98
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporab Peristiwa Kependudukan	40.166.000	1	36.531.500	0,25	1.691.500	4,63
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	23.525.000	19	22.934.000	0	0	0
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	23.525.000	1	22.934.000	0	0	0
C	Program Pencatatan Sipil	161.069.000	98	155.698.000	n/a	32.177.185	20,67

No	Uraian	Renja Tahun 2025	DPA Tahun 2025		Capaian Triwulan I Tahun 2025		% Capaian Tahun 2025
			K	Rp	K	Rp	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	87.544000	25.000	86.549.000	5.500	20.119.185	23,25
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Pristiwa Penting	35.377.000	22.000	34.660.000	7.200	15.148.685	43,71
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	52.367.000	6	51.889.000	6	4.970.500	9,58
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	73.525.000	25.000	69.149.000	6.000	12.058.000	17,44
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	23.525.000	1	22.965.000	0	0	0
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	50.000.000	1	46.184.000	0,25	12.058.000	26,11
D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	2.712.129.000	99,50	2.705.844.000	n/a	72.322.370	2,67
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database kependudukan	126.414.000	200	123.674.000		22.757.370	18,40
	Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	126.414.000	1	123.674.000	0,25	22.757.370	18,40
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.585.715.000	14	2.582.170.000		49.565.000	1,92
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	2.442.984.000	2	2.442.541.000	0,50	29.155.000	1,19
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	117.731.000	2	116.839.000	0,50	19.152.500	16,39
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.000.000	1	22.790.000	0,25	1.257.500	5,52

No	Uraian	Renja Tahun 2025	DPA Tahun 2025		Capaian Triwulan I Tahun 2025		% Capaian Tahun 2025
			K	Rp	K	Rp	
E	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	81.000.000	100	76.130.500		1.600.000	2,10
	Penyusunan Profil Kependudukan	81.000.000	3	76.130.500		1.600.000	2,10
	Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	81.000.000	3	76.130.500		1.600.000	2,10

A. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun 2025, program kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, di antaranya sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk, dengan fokus kegiatan pada :
 - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan fokus sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
 - 2) Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan.
 - b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan fokus sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting;
 - 2) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.
 - b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dengan fokus sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil;
 - 2) Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan fokus kegiatan pada :
- a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dengan fokus sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan fokus sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - 3) Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan fokus kegiatan pada :
- a. Penyusunan Profil Kependudukan, dengan fokus sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus kegiatan pada :
- a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan fokus sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan fokus sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor

- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan fokus sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan fokus sub kegiatan sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Penyebab belum tercapainya target kinerja triwulan I yaitu adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan efisiensi belanja ATK, Perjalanan Dinas dan Menunda Belanja Modal di triwulan IV.

B. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Triwulan I Tahun 2025, baru beberapa sub kegiatan yang sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan di triwulan I. Kegiatan yang memenuhi target yaitu kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Hal ini karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang sudah ditetapkan penjadwalannya oleh peraturan perundang-undangan.

C. Realisasi program, kegiatan dan subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun 2025, belum ada program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena masih perhitungan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

D. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan.

Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 terpengaruh dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun kembali kebutuhan belanja yang dapat diefisiensi maupun yang harus dilaksanakan.

E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun transisi, dimana tahun ini Pemda juga berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-

2029. Bersamaan dengan hal tersebut Perangkat Daerah juga berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Disamping mencapai target Renja yang telah ditetapkan, perangkat daerah juga harus menyelaraskan dengan target kinerja baru yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029

F. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Dalam perjalanannya dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 maka dilakukan efisien pagu anggaran sebagai berikut :

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SEMARANG
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									12.396.007.000,00	12.790.534.000,00	12.400.379.000,00	4.372.000,00						12.668.505.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								12.396.007.000,00	12.790.534.000,00	12.400.379.000,00	4.372.000,00							12.668.505.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								12.396.007.000,00	12.790.534.000,00	12.400.379.000,00	4.372.000,00							12.668.505.000,00	
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah				100,00 %	100,00 %	7.888.512.000,00	8.333.889.250,00	7.993.246.900,00	2.691.632.000,00								10.580.144.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Penyalusahan Perangkat Daerah				100,00 %	100,00 %	43.063.000,00	38.758.000,00	28.292.000,00	-14.771.000,00				3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			124.287.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	28.702.000,00	24.982.000,00	17.496.000,00	-11.206.000,00	Kab. Semarang, Uraian Berat, Uraian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		17.562.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Laporan	5 Laporan	5.508.000,00	5.073.000,00	4.403.000,00	-1.105.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		16.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	4 Laporan	8.853.000,00	8.703.000,00	6.393.000,00	-2.460.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		90.325.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00 %	100,00 %	6.448.771.000,00	7.004.358.000,00	7.031.919.500,00	583.148.500,00			-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.807.537.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			80 Orangbulan	80 Orangbulan	6.406.471.000,00	6.963.061.500,00	6.998.988.000,00	592.517.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBILANGAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJAJIAN KERJA	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			7.765.287.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	42.300.000,00	41.296.500,00	32.931.500,00	-9.368.500,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			42.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengembangan SDM Pelayanan Administrasi Kependudukan			100,00 %	100,00 %	9.000.000,00	7.567.750,00	4.238.000,00	-4.762.000,00					3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	1 Orang	9.000.000,00	7.567.750,00	4.238.000,00	-4.762.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		40.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00 %	100,00 %	381.500.000,00	360.321.500,00	384.651.000,00	3.151.000,00					3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	253.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.500.000,00	150.485.000,00	150.485.000,00	-15.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	119.000.000,00	118.526.000,00	118.526.000,00	-474.000,00	Kab. Semarang, Semarang Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		88.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	112.000.000,00	91.310.500,00	115.640.000,00	3.640.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		84.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Pengadaan Kebutuhan Perangkat Daerah			100 %	100 %	500.000.000,00	417.054.000,00	27.652.000,00	-472.348.000,00			-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.240.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2 Unit	1 Unit	475.000.000,00	392.080.000,00	0,00	-475.000.000,00	Kab. Semarang, Urahan Barat, Urahan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		1.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			20 Unit	13 Unit	25.000.000,00	24.974.000,00	27.652.000,00	2.652.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		40.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran			100,00 %	100,00 %	274.739.000,00	274.384.000,00	275.528.000,00	789.000,00			-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	664.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	49.701.000,00	49.126.000,00	-674.000,00	Kab. Semarang, Ulangan Barat, Ulangan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		382.950.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	160.341.000,00	160.321.000,00	160.321.000,00	-20.000,00	Kab. Semarang, Ulangan Barat, Ulangan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		191.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	64.398.000,00	64.362.000,00	66.061.000,00	1.683.000,00	Kab. Semarang, Uraan Barat, Uraan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		90.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100,00 %	100,00 %	231.438.000,00	231.246.000,00	240.966.400,00	9.627.400,00			-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	450.620.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	10 Unit	83.482.000,00	83.438.000,00	92.297.000,00	8.815.000,00	Kab. Semarang, Uraan Barat, Uraan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		118.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi			2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	59.938.000,00	59.938.000,00	-62.000,00	Kab. Semarang, Uraan Barat, Uraan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		53.120.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	37.957.000,00	37.896.000,00	38.757.400,00	800.400,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		210.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10 Unit	39 Unit	50.000.000,00	49.974.000,00	49.974.000,00	-26.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		69.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk			99,93 %	99,93 %	1.553.287.000,00	1.519.172.250,00	1.511.685.800,00	-761.971.000,00						791.328.000,00		
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terselesaikan			150000 Dokumen	150000 Dokumen	1.529.772.000,00	1.496.238.250,00	1.432.631.800,00	-97.140.200,00			-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Penduduk Kabupaten Semarang	777.231.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			2 Dokumen	2 Dokumen	44.459.000,00	38.704.250,00	26.669.500,00	-17.789.500,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		48.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																	
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk					60000 Dokumen	60000 Dokumen	924.002.000,00	923.973.000,00	923.973.000,00	-29.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		291.836.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk																	
	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk					3 Orang	3 Orang	25.000.000,00	21.412.500,00	15.862.500,00	-9.137.500,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					1 Laporan	1 Laporan	496.145.000,00	475.617.000,00	438.800.300,00	-57.344.700,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		328.990.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																	
	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan					1 Laporan	1 Laporan	40.166.000,00	36.531.500,00	27.326.500,00	-12.839.500,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		47.656.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi pendaftaran penduduk			19 Kegiatan	7 Kegiatan	23.525.000,00	22.934.000,00	79.034.000,00	55.509.000,00			-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Penduduk Kabupaten Semarang		14.095.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																		
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			1 Laporan	1 Laporan	23.525.000,00	22.934.000,00	79.034.000,00	55.509.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			14.095.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran dan Akta Kematian		98,00 %	98,00 %	161.068.000,00	155.898.000,00	138.356.500,00	342.081.000,00							503.190.000,00		
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan dokumen pencatatan sipil yang terselesaikan		25000 Dokumen	25000 Dokumen	87.544.000,00	86.549.000,00	79.908.500,00	-7.635.500,00			-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Penduduk Kabupaten Semarang		283.808.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Capaian kinerja kegiatan akan menunjukkan sejauh mana keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan suatu perangkat daerah. Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Sasaran Tahun 2021-2026

TUJUAN PD	SASARAN	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-						REALISASI						Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan		96,12	86,69	87,75	88,5	90,5	91,5	93	83,27	85,46	88,11	92,58	n/a		DKB Smt 1 Juli 2025
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk		101,19	81	82,5	85	87	88	90	82,17	81,79	86,24	93,18	n/a		
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		94,76	88,38	90	92	94	95	96	84,38	89,12	89,98	91,99	n/a		

Adapun realisasi kinerja urusan wajib Kependudukan dan pencatatan Sipil dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Sesuai RKPD 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI TW I 2025	%
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	92,58	91,50	n/a	
2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	93,18	88,00	n/a	
3	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	91,99	95,00	n/a	

Untuk realisasi tahun 2024 telah melebihi target Penetapan 2025, hal ini terjadi karena data realisasi Cakupan Kepemilikan dokumen kependudukan baru dirilis oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada akhir bulan Januari 2025, sedangkan target kinerja tahun 2025 ditetapkan dan ditandatangani Bupati dan Kepala Perangkat Daerah pada awal bulan Januari 2025. Oleh karena itu diusulkan penyesuaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Perubahan Renja Tahun 2025.

Realisasi Triwulan I Tahun 2025 belum dapat disajikan karena data resmi Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan dirilis Semesteran, untuk Semester I rilis dibulan Juli 2025 dan Data Semester II tahun 2025 baru akan dirilis bulan Januari tahun 2026.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Semarang yaitu :

1. Pelaksanaan sosialisasi administrasi kependudukan melalui tatap muka, media elektronik dan media sosial sehingga masyarakat semakin sadar pentingnya dokumen kependudukan yang selalu diperbarui datanya.

2. Membangun ekosistem pelayanan administrasi kependudukan mulai dari pelayanan adminduk cukup di desa/kelurahan (Desa #GISA), pelayanan di Kecamatan, pelayanan di Dinas Dukcapil, pelayanan di MPP, pelayanan dengan mitra Dukcapil, pelayanan jemput bola serta pelayanan online melalui <https://sipendukonline.semarangkab.go.id> dan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan ini penduduk dapat menyesuaikan cara, waktu dan tempat untuk pengurusan dokumen kependudukannya.
3. Melakukan inovasi pelayanan yang bertujuan mempermudah, mempercepat dan mendekatkan layanan adminduk kepada masyarakat.
4. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta dan dunia usaha sebagai upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan Administrasi Kependudukan dengan berbagai bimbingan teknis maupun pelatihan

Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan (faktor penghambat) adalah :

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Masih ada masyarakat yang tidak peduli akan keamanan, kebenaran dan keakuratan data kependudukannya.
3. Belum Maksimalnya penduduk Kabupaten Semarang dalam memanfaatkan teknologi, khususnya ponsel baik untuk mengurus kepemilikan dokumen kependudukan maupun untuk memperoleh informasi mengenai administrasi kependudukan.

4. Pemanfaatan dokumen kependudukan seperti KTP dan KIA belum banyak dipersyaratkan dalam dunia usaha oleh pihak swasta, sehingga Perjanjian Kerja Sama dengan DispendukCapil belum optimal.
5. Belum optimalnya kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama perihal data pencatatan perkawinan dan perceraian.
6. Belum adanya insentif bagi petugas registrasi desa/kelurahan dalam membantu pelayanan Adminduk di desa/kelurahan.
7. Terbatasnya sarana prasarana pelayanan adminduk.

Tabel
Indikator Kinerja Berdasarkan Program

Indikator Program	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi Triwulan I 2025	%
Program Pendaftaran penduduk	Persen	99,99 %	99,93%	n/a	
Program Pencatatan Sipil	Persen	99,72 %	98,00%	n/a	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	99,99 %	99,50%	n/a	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100 %	100%	2%	

Dilihat dari tabel diatas bahwa target kinerja Program pada Penetapan APBD tahun 2025 sudah terlampaui oleh realisasi kinerja program tahun 2024, oleh sebab itu dilakukan penyesuaian berdasar realisasi kinerja tahun 2024 serta penyesuaian atas indikator yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029.

Tabel 2.4
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup
Kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025

NO	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Priode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		Ket			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13=9+10+11+12			14=13+7			15=14/6*100 %		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11		12		13=9+10+11+12			14=13+7		15=14/6*100 %		16		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah yang disusun	%	100	51.825.726.000	100	29.633.493.937	100	8.333.689.250	25	1.872.981.754								25		1.872.981.754	25	31.506.475.691	25	61	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah yang disusun	%	100	1.266.932.000	100	354.213.070	100	38.758.000	25	9.687.000								25		9.687.000	25	363.900.070	25	29	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	67.888.000	20	36.423.180	5	24.982.000	2	7.354.000								2	40	7.354.000	22	43.777.180	88	64	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA/DPA DAK Nonfisik Admindex	Dokumen	5	72.346.000	0	0	0	0																	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	32	303.873.000	41	69.730.660	5	5.073.000	2	833.000					2	40	833.000	43	70.563.660	134	23
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	22	822.825.000	40	248.059.230	4	8.703.000	3	1.500.000					3	75	1.500.000	43	249.559.230	195	30
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	37.047.150.000	100	23.462.252.837	100	7.004.358.000	25	1.713.903.408					25		1.713.903.408	25	25.176.156.245	25	68
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	36.848.488.000	56	23.303.970.987	80	6.963.061.500	80	1.705.553.408					80	100	1.705.553.408	136	25.009.524.395	194	68
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	60	198.662.000	48	158.281.850	12	41.296.500	3	8.350.000					3	25	8.350.000	51	166.631.850	85	84
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Person					100	7.567.750	0	0					0		0	0	0	0	0
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	160.000.000	1	19.275.000	0	0										1	19.275.000	100	12

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kegiatan	65	145.500.000			2	7.567.750	0	0				0	0	0	0	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran PD	%	100	7.748.371.000	100	2.563.399.120	100	360.321.500	25	37.082.000				25	37.082.000	25	2.600.481.120	25	34	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	6.301.736.000	5	1.446.627.000	1	150.485.000	0	0				0	0	0	5	1.446.627.000	250	23
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	30	395.736.000	21	343.949.500	1	118.526.000	0,25	18.874.000				0	25	18.874.000	21	362.823.500	71	92
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	125	1.050.899.000	48	772.822.620	12	91.310.500	3	18.208.000				3	25	18.208.000	51	791.030.620	41	75
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran PD	%	100	172.000.000	100	0	100	417.054.000	0	0				0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit					1	392.080.000	0	0				0	0	0	0	0	0	0

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	27	172.000.000			20	24.974.000	0,00	0					0		0	0	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran PD	%	100	4.278.323.000	100	1.973.541.442	100	274.384.000	25	73.480.395					25		73.480.395	25	2.047.021.837	25	48
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	1.638.525.000	48	656.642.091	12	49.701.000	3	8.676.000					3	25	8.676.000	51	665.318.091	85	41
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	60	900.000.000	48	575.484.371	12	160.321.000	3	32.813.025					3	25	32.813.025	51	608.297.396	85	68
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	60	1.739.798.000	48	741.414.980	12	64.362.000	3	31.991.370					3	25	31.991.370	51	773.406.350	85	44
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran PD	%	100	1.312.950.000	100	1.280.087.468	100	231.246.000	25	38.828.951					25		38.828.951	25	1.318.916.419	25	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	unit	85	551.000.000	65	398.490.739	10	83.438.000	4	16.509.766					4	40	16.509.766	69	415.000.505	81	75

	atau Lapangan	pajak dan perizinannya																		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	unit	10	235.400.000	5	352.797.033	2	59.938.000	0	0			0	0	0	5	352.797.033	50	150
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit	5	200.200.000	38	209.521.433	2	37.896.000	1	11.629.185			1	25	11.629.185	39	221.150.618	770	110
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	unit	50	326.350.000	30	319.278.263	10	49.974.000	4	10.690.000			4	40	10.690.000	34	329.968.263	68	101
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk	%	99,95	3.787.824.000	99,90	5.064.366.943	99,90	1.519.172.250	NA	93.394.276			N/A		93.394.276	N/A	5.157.761.219	N/A	136
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terselesaikan	Dokumen	447.750	3.584.148.000	74.250	5.064.366.943	150.000	1.496.238.250	18.500	93.394.276			18.500		93.394.276	92.750	5.157.761.219	21	144
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Dokumen hasil Pendataan Penduduk Non Permanen	Dokumen	10	191.777.000	10	162.112.648	2	38.704.250	1,00	10.585.000			1	50	10.585.000	11	172.697.648	110	90

	Kependudukan dan Rentan Administrasi Kependudukan																				
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	30	1.356.586.000	291000	3.130.292.305	60000	923.973.000	10000	0				10000	17	0	301000	3.130.292.305	1.003.333	231
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	orang	3750	348.147.000		0	3	21.412.500	1	5.130.000				1	33	5.130.000	1	5.130.000	0	1
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	391000	1.501.157.000	200501	1.614.776.290	1	475.617.000	0	75.987.776				0	0	75.987.776	200501	1.690.764.066	51	113
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	186481	186.481.000	13901	157.185.700	1	36.531.500	0	1.691.500				0	0	1.691.500	13901	158.877.200	7	85
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Pendaftaran penduduk	Kegiatan	95	203.676.000	0	0	19	22.934.000	0	0				0		0	0	0	0	0
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	orang	2850	203.676.000			1	22.934.000	0	0				0	0	0	0	0	0	0

	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran dan Kematian	%	98,88	2.064.918.300	93,13	1.329.658.107	95,00	155.698.000	NA	32.177.185	0	0	0	N/A	32.177.185	1.361.835.292	0	66			
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil yang terselesaikan	do ku me n	1110 00	1.302.480.000	2200 0	1.287.817.107	25.00 0	86.549.000	55 00	20.119.185	0	0	0	5.5 00	20.119.185	30. 50 0	1.307.936.292	27	100		
	Pencatatan, Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	do ku me n	1110 00	365.225.000	8030 0	290.947.710	22.00 0	34.660.000	72 00	15.148.685				7.2 00	33	15.148.685	87. 50 0	306.096.395	79	84	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Lay ana n	7	937.255.000	6	996.869.397	6	51.889.000	6,0 0	4.970.500				6	10 0	4.970.500	6	1.001.839.897	86	107	
	Penyelengga raan Pencatatan Sipil	Jumlah permohonan pelayanan dokumen pencatatan sipil	do ku mn	1115 00	762.438.300	22.10 0	41.841.000	25.00 0	69.149.000	6.0 00	12.058.000	0	0	0	0	0	6.0 00	12.058.000	28. 10 0	53.899.000	25	7
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Lap ora n	2850	11.166.300	1	41.841.000	1	22.965.000	0	0				0	0	0	1	41.841.000	0	375	
	Penyajian Data Kependuduk an yang Akurat dan dapat Dipertanggun jawab terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan penyajian data kependuduka n yang akurat dan dapat dipertanggun jawabkan terkait Pencatatan Sipil	Lap ora n	3330 00	751.272.000			1	46.184.000	0	12.058.000				0	0	12.058.000	1	12.058.000	0	2	

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Database Kependudukan yang Akurat	%	99,60	3.217.901.000	99,20	2.967.254.353	99,30	2.705.844.000	N/A	72.322.370					N/A	72.322.370	1	3.039.576.723	1	94
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data ganda dan anomali yang terselesaikan	Data	50000	590.018.000	12000	610.914.309	200	123.674.000	2500	22.757.370					2.500	22.757.370	14.500	633.671.679	29	107
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	Dokumen	12	590.018.000	19	610.914.309	1	123.674.000	0	22.757.370					00	22.757.370	19	633.671.679	158	107
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem informasi kependudukan yang dikelola	jenis	14	2.627.883.000	14	2.356.340.044	14	2.582.170.000	3	49.565.000					3	49.565.000	17	2.405.905.044	121	92
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	5	1.103.501.000	5	1.722.320.799	2	2.442.541.000	0,00	29.155.000					00	29.155.000	5	1.751.475.799	100	159
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	dokumen	10	717.630.000	8	634.019.245	2	116.839.000	0	19.152.500					00	19.152.500	8	653.171.745	80	91
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah laporan hasil sosialisasi Pengelolaan Informasi	Laporan	4	806.752.000			1	22.790.000	0	1.257.500					00	1.257.500	0	1.257.500	0	0

	Kependudukan	Administrasi Kependudukan																				
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Informasi Kependudukan	%	100	402.332.000	100,00	390.934.585	100,00	76.130.500	25	1.600.000				25	1.600.000	125	392.534.585	125	98		
	Penyusunan Profil Kependudukan	Jenis Data Kependudukan yang Dipublikasikan setiap tahun	Jenis	15	402.332.000	3	390.934.585	3	76.130.500	0	1.600.000				0	0	1.600.000	3	392.534.585	20	98	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan sertaKebutuhan yang lain	Jumlah dokumen Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang tersusun	Dokumen	15	402.332.000	12	390.934.585	3	76.130.500	0	1.600.000				0	0	1.600.000	12	392.534.585	80	98	
															23,21	2.072.475.585						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																						
Predikat Kinerja																						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

2.3 Akuntabilitas Keuangan

Target dan Realisasi Belanja Oprasional dan Belanja Modal Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Persentase Belanja Operasional dan Belanja Modal
Target dan Realisasi Belanja Triwulan I Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	%
A	BELANJA OPERASI	10.752.012.000	2.072.475.585	19,28
1	Belanja Pegawai	6.963.061.500	1.705.553.408	24,49
2	Belanja Barang dan Jasa	3.788.950.500	366.922.177	9,68
B	BELANJA MODAL	2.038.522.000	0	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.038.522.000	0	
	Jumlah Belanja A+B	12.790.534.000	2.072.475.585	

Dari tabel diatas dilihat rincian belanja daerah terdiri dari belanja oprasi sebesar Rp. 10.752.012.000,- dan belanja modal Rp. 2.038.522.000,-. Realisasi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang jasa sampai dengan Triwulan I sebesar 19,28% atau Rp. 2.072.475.585,-. Sedangkan belanja modal belum terealisasi belanjanya karena adanya kebijakan efisiensi belanja dan penundaan belanja modal di semester 2.

2.4 Target dan Capaian Program Kependudukan dan Catatan Sipil sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Capaian Program Kependudukan dan Sipil
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

No	URAIAN	TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN S/D Triwulan I 2025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	100%	30%
2	Program Pendaftaran Penduduk	99,90%	n/a
3	Program Pencatatan Sipil	95,00%	n/a
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99,30%	n/a
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	2%

Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang belum dapat dilihat capaian programnya karena data capaian kepemilikan dokumen kependudukan baru dirilis bulan Juli 2025 untuk capaian Semester 1.

2.5 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang agar berdampak signifikan yaitu penentuan dan pengidentifikasian isu-isu yang cermat, tepat dan strategis. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Semarang, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yaitu :

1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang berkewajiban untuk memberikan identitas dan dokumen kependudukan bagi seluruh penduduk Kabupaten Semarang tanpa adanya diskriminasi.

2. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
Pemanfaatan *database* kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional sebagai isu utama, serta pemanfaatan dokumen kependudukan bukan hanya sebagai identitas namun juga untuk berbagai kepentingan.
3. Reformasi Birokrasi (Pelayanan Publik).
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan memerlukan strategi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang baik dari *performance pelayanan* maupun keakuratan data kependudukan.

2.6 Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam peningkatan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yaitu:

1. Adanya regulasi yang menghambat pelaksanaan tugas,
2. Adanya masyarakat yang tidak peduli akan keamanan, kebenaran dan keakuratan data kependudukannya,
3. Disrupsi digital dan serangan siber terhadap data kependudukan secara global, nasional dan regional.
4. Terbatasnya Implementasi teknologi di daerah pedesaan

Peluang dalam pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat ditangkap oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Meningkatkan efisiensi layanan melalui pemanfaatan perkembangan Teknologi dan Komunikasi.
2. Integrasi sistem informasi kependudukan dengan sistem informasi lainnya.
3. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam tertib Adminduk
4. Meningkatkan sinergitas dengan instansi lain dalam pemanfaatan dokumen kependudukan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang terdiri dari 5 program, 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1.

Dapat dilihat pada tabel 3.1 Pendanaan dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebesar Rp. 12.396.007.000,- (Dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ribu rupiah) dan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pagu Indikatif menjadi Rp. 12.328.753.000,- (Dua belas milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau berkurang Rp. 67.254.000,- (Enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian masing masing program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Rp. 7.921.620.900,-
2. Program Pendaftaran Penduduk Rp. 1.511.665.800,-
3. Program Pencatatan Sipil Rp. 139.256.500,-
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp. 2.687.759.300,-
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan Rp. 68.350.500,-

Tabel 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SEMARANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKR AAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								12.396.007.000,00	12.790.534.000,00	12.328.753.000,00	-87.254.000,00							12.668.505.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.396.007.000,00	12.790.534.000,00	12.328.753.000,00	-87.254.000,00								12.668.505.000,00	
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							12.396.007.000,00	12.790.534.000,00	12.328.753.000,00	-87.254.000,00								12.668.505.000,00	
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah				100,00 %	100,00 %	7.888.512.000,00	8.333.689.250,00	7.921.620.900,00	2.691.632.000,00								10.580.144.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Penelusuran Perangkat Daerah				100,00 %	100,00 %	43.063.000,00	38.758.000,00	28.292.000,00	-14.771.000,00								124.287.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	28.702.000,00	24.982.000,00	17.496.000,00	-11.206.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		17.562.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5.508.000,00	5.073.000,00	4.403.000,00	-1.105.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		16.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	8.853.000,00	8.703.000,00	6.393.000,00	-2.460.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		90.325.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00 %	100,00 %	6.448.771.000,00	7.004.358.000,00	6.960.293.500,00	511.522.500,00			-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.807.537.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					80 Orangbulan	79 Orangbulan	6.406.471.000,00	6.963.061.500,00	6.927.362.000,00	520.891.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DAN ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM NYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			7.765.287.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SIPD																		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	42.300.000,00	41.296.500,00	32.931.500,00	-9.368.500,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			42.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengembangan SDM Pelayanan Administrasi Kependudukan			100,00 %	100,00 %	9.000.000,00	7.567.750,00	4.238.000,00	-4.762.000,00					3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		40.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Orang	1 Orang	9.000.000,00	7.567.750,00	4.238.000,00	-4.762.000,00	Kab. Semarang, Ungeran Barat, Ungeran	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			40.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00 %	100,00 %	381.500.000,00	360.321.500,00	384.651.000,00	3.151.000,00					3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		253.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	150.500.000,00	150.485.000,00	150.485.000,00	-15.000,00	Kab. Semarang, Ungeran Barat, Ungeran	DANA BAGI HASIL (DBH)	-		3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	119.000.000,00	118.526.000,00	118.526.000,00	-474.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		85.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	112.000.000,00	91.310.500,00	115.640.000,00	3.640.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		84.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persenjataan Pengadaan Kebutuhan Perangkat Daerah			100 %	100 %	500.000.000,00	417.054.000,00	27.652.000,00	-472.348.000,00			-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.240.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2 Unit	0 Unit	475.000.000,00	392.080.000,00	0,00	-475.000.000,00	Kab. Semarang, Anggaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		1.200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			20 Unit	13 Unit	25.000.000,00	24.974.000,00	27.652.000,00	2.652.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		40.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Perkantoran			100,00 %	100,00 %	274.739.000,00	274.384.000,00	275.528.000,00	789.000,00			-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	664.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	49.701.000,00	49.126.000,00	-874.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		382.950.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	160.341.000,00	160.321.000,00	160.321.000,00	-20.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		191.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	64.398.000,00	64.362.000,00	66.081.000,00	1.683.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		90.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100,00 %	100,00 %	231.439.000,00	231.246.000,00	240.966.400,00	9.527.400,00			-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	450.620.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	10 Unit	83.482.000,00	83.438.000,00	92.297.000,00	8.815.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		118.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	59.938.000,00	59.938.000,00	-62.000,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		53.120.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																

		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	37.957.000,00	37.896.000,00	38.757.400,00	800.400,00	Kab. Semarang, Ungaran Barat, Ungaran	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		210.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pasanana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10 Unit	39 Unit	50.000.000,00	49.974.000,00	49.974.000,00	-26.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		69.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk			99,95 %	93,18 %	1.553.297.000,00	1.519.172.250,00	1.511.685.800,00	-761.971.000,00						791.328.000,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang terselesaikan			150000 Dokumen	152920 Dokumen	1.529.772.000,00	1.496.238.250,00	1.432.631.800,00	-97.140.200,00			-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Penduduk Kabupaten Semarang	777.231.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rerentan Administrasi Kependudukan																

		Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Renjian Administrasi Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	44.459.000,00	38.704.250,00	26.689.500,00	-17.789.500,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			48.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				60000 Dokumen	150000 Dokumen	924.002.000,00	923.973.000,00	923.973.000,00	-29.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			291.835.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk																		
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				3 Orang	3 Orang	25.000.000,00	21.412.500,00	15.862.500,00	-9.137.500,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	496.145.000,00	475.617.000,00	438.800.300,00	-57.344.700,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			328.990.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Laporan Peristiwa Kependudukan																	
		Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	40.166.000,00	36.531.500,00	27.326.500,00	-12.839.500,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		47.656.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi/pendaftaran penduduk				19 Kegiatan	7 Kegiatan	23.525.000,00	22.934.000,00	79.034.000,00	55.509.000,00			-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Penduduk Kabupaten Semarang	14.095.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03.0006	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																	
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	23.525.000,00	22.934.000,00	79.034.000,00	55.509.000,00	Kab. Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih		14.095.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			98,00 %	95 %	161.089.000,00	155.698.000,00	139.358.500,00	342.081.000,00						503.150.000,00	

2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil yang Terealisasi	25000 Dokumen	22400 Dokumen	87.544.000,00	86.549.000,00	79.908.500,00	-7.635.500,00	-	3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 3. Pencapaian Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Penduduk Kabupaten Semarang	283.806.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting												

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I dan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, perlunya penyesuaian terhadap pengembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan

Perubahan indikator kinerja juga perlu disesuaikan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai Panduan Perangkat Daerah dalam Menyusun perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sehingga pelaksanaan program-program Pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan bermanfaat bagi Masyarakat.

Ungaran, Mei 2025

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SEMARANG

